BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program nasional Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan BLSM kembali dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang di naikkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Juni 2013 lalu. BLSM sejatinya merupakan bantuan sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin yang diberikan selama empat tahap dengan nominal Rp150.000,00 per satu tahapan pembagian selama empat bulan kedepan. Pencairan pertama dapat di ambil mayarakat yang terdaftar sebagai penerima BLSM dapat diambil di bulan Juli dan dirapelkan dengan bulan Agustus, sehingga dalam pembagian BLSM tahap I dan II disatukan dengan nominal sebesar Rp300.000,00.

Permasalahan mulai muncul setelah program itu di luncurkan. Terjadi pro dan kontra mewarnai pembagian dana tersebut. Banyak kalangan terdidik menilai bahwa program ini hanyalah program politis dari pemerintah yang hanya untuk kepentingan seseorang atau golongan tertentu saja. Akan tetapi pihak yang pro mengatakan bahwa, dengan diberikannya BLSM ini setidaknya masyarakat miskin dapat mampu bertahan dengan adanya inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan bahan bakar minyak tersebut. Dari partai oposisi menyatakan bahwa tidak mungkin kehidupan masyarakat miskin hanya diberi insentif yang totalnya sebesar Rp600.000,00 saja. Melihat dari kebutuhan hidup dan dari kenaikan harga bahan pokok yang terjadi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut, mereka berpendapat sebaiknya pemerintah memikirkan cara lain bukan dari memberi BLSM melainkan dari menumbuhkan lagi pos-pos lapangan pekerjaan dan menciptakan

pendidikan murah bagi seluruh rakyat Indonesia karena itu terjamin didalam konstitusi negara.

Banyak pihak yang meragukan apakah BLSM ini diterima oleh warga yang memang layak untuk mendapatkannya atau tidak karena kondisi dilapangan sering kali berbeda dengan data pemegang kartu bantuan sosial BLSM. Pada tahun 2008 dengan tekhnis format penyaluran yang sedikit berbeda dan dengan nama yang berbeda yaitu BLT (bantuan langsung tunai) banyak sekali timbul indikasi ketidak tepatan penerima dana BLT dengan masih ditemukannya masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT dan masyarakat yang sudah mapan namun terdaftar sebagai penerima BLT. Hal yang menjadi pembeda yaitu dalam proses pembagiannya, dulu di era BLT pembagiannya menggunakan kupon, akan tetapi saat ini pembagiannya menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterbitkan oleh Kementrian Sosial. Pengalaman ini membuat masyarakat merasa bahwa apa yang terjadi di tahun 2008 akan terjadi lagi di era BLSM ini.

Pembagian BLSM di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang di bagikan pada tanggal 27 Juli 2013 lalu menunjukan bahwa apa yang terjadi di masa BLT sedikit banyak tidak terbukti. Mayoritas warga penerima BLSM merupakan buruh tani di Cibereum, maka tidak mengagetkan jika penerima dana BLSM di Cibereum berjumlah 2.045 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 15.576 jiwa. Tekhnis penentuan siapa saja yang pantas menerima dana BLSM bukanlah Kepala Desa dan juga bukan aparatur desa, melainkan Kepala Desa Cibereum memberi hak ketua RW di masing-masing RW yang berjumlah 29 RW di Cibereum yang menentukan dan memilih siapa yang pantas untuk menerima BLSM tersebut. Dengan alasan bahwa ketua RW lebih mengetahui secara pasti siapa warga yang tinggal di

RWnya yang pantas menerima BLSM tersebut sehingga potensi ketidak layakan penerima BLSM berkurang. Selain itu, terdapat 55 warga pengganti warga sebelumnya yang terdaftar sebagai penerima BLSM dengan alasan warga yang terdaftar tersebut telah pindah dan sesuai dengan musyawarah penggantian yang telah dilaksanakan.

Akan tetapi, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa ada beberapa warga yang datang dan menerima dana BLSM tersebut dengan menggunakan aksesoris perhiasan yang menggantung di pergelangan tangan dan di lehernya. Penulis menduga bahwa perhiasan yang digunakannya tersebut adalah emas. Disamping itu menurut kesaksian Kepala Desa, terdapat pemotongan sebesar Rp50.000,00 yang dilakukan oleh salah satu ketua RW kepada seluruh warganya yang tinggal di RW yang ia pimpin dengan alasan untuk menanggulangi warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM akan tetapi faktanya uang yang ia potong tersebut tidak disalurkan kepada yang tidak terdaftar sebagaimana yang ia katakan melainkan masuk kedalam kantong pribadi ketua RW tersebut. Kejadian seperti ini mungkin bukan hanya di Cibereum saja melainkan di daerah-daerah lain juga seperti yang kita ketahui pada kasus BLT di tahun 2008 silam.

Sesuai jadwal, pembagian BLSM di Cibereum dimulai pukul 11.00 WIB, akan tetapi molor hingga pukul 12.00 WIB. Hal ini dikarenakan pihak dari PT. Pos selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan BLSM telat datang. Akan tetapi sebelum perwakilan dari PT. Pos tiba, aparatur desa dibuat kewalahan oleh warga yang mengurus administrasi untuk kelengkapan pencairan dana BLSM tersebut. Fakta yang menarik lagi penulis menemukan adanya tindakan koruptif yang dilakukan oleh seorang oknum aparatur desa Cibereum yang meminta uang untuk kepengurusan pembuatan

surat kartu keluarga sementara sebagai syarat untuk pengambilan BLSM.

Ini tentu kontradiktif, mengingat seluruh instansi dan lembaga pemerintahan saat ini berlomba-lomba untuk melakukan reformasi birokrasi yang cepat dan melayani kepada seluruh masyarakat Indonesia akan tetapi yang penulis temukan dilapangan masih saja tindakan-tindakan korupsi yang ditemukan di pemerintah ter rendah di desa pun tak luput teracuni dari tindakan koruptif ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Kegiatan

Adapun manfaat dari laporan penulisan ini diantaranya:

1. Laporan ini yaitu untuk menjadi bahan untuk menambah referensi pengetahuan pembaca mengenai masalah-masalah yang terjadi terhadap pembagian dana sosial dalam program nasional BLSM;
2. Memberi informasi mengenai proses tata cara pembagian BLSM di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
3. Memberi informasi kepada pembaca mengenai kelemahan dan kelebihan program nasional BLSM yang terjadi di masyarakat.

1.2.2 Tujuan Kegiatan

Laporan mengenai pembagian BLSM ini mempunyai tujuan diantaranya yaitu:

1. Kepada Pemerintah: laporan ini bertujuan untuk melaporkan bagaimana tindakan aparatur pemerintah desa dan tata cara pembagian dalam program BLSM di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Juli 2013 lalu.

2. Kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan UNIKOM: laporan ini bertujuan untuk melaporkan apa saja yang terjadi di lapangan dan juga sebagai laporan akhir dalam kelengkapan nilai KKL-PPM Ilmu Pemerintahan UNIKOM .
3. Kepada Masyarakat Cibereum: laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Cibereum bagaimana seharusnya pembagian dan pelayanan publik dalam rangka pembagian BLSM di Cibereum dilakukan.
4. Kepada pribadi penulis: laporan ini sebagai bahan kajian kelak untuk mengadakan penelitian langsung dan sebagai data pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).